



**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
(KOTA MALANG DAN KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh:**

**Mardhani Susilawati**

**NPM. 21801082252**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2021**

## ABSTRAK

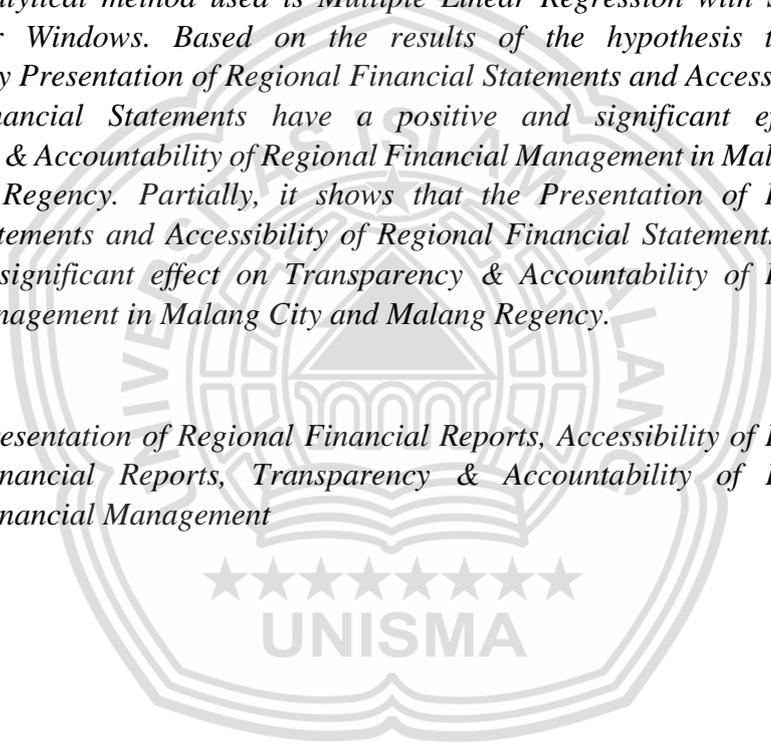
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai aktif pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang sebagai pengguna laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Pemkot yang menjadi responden adalah bagian anggaran dan perbendaharaan, bagian akuntansi dan pengelolaan aset daerah dan bagian pemanfaatan aset daerah dan telah bekerja lebih dari 1 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan software SPSS 22 for Windows. Berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Secara parsial menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang dan Kabupaten Malang.

**Kata kunci:** penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## ABSTRACT

*This research was conducted to analyze “the influence of the presentation of regional financial statements and the accessibility of regional financial statements on the transparency and accountability of regional financial management in Malang City and Malang Regency”. The sample in this study were active employees of the Malang city and district government as users of financial reports presented by local governments, in accordance with applicable laws and regulations. The municipal government employees who are the respondents are the Budget and Treasury Division, Accounting and Regional Asset Management Division and Regional Asset Utilization Division and have worked for more than 1 year. The analytical method used is Multiple Linear Regression with SPSS 22 Software For Windows. Based on the results of the hypothesis test that simultaneously Presentation of Regional Financial Statements and Accessibility of Regional Financial Statements have a positive and significant effect on Transparency & Accountability of Regional Financial Management in Malang City and Malang Regency. Partially, it shows that the Presentation of Regional Financial Statements and Accessibility of Regional Financial Statements have a positive and significant effect on Transparency & Accountability of Regional Financial Management in Malang City and Malang Regency.*

**Keywords:** *Presentation of Regional Financial Reports, Accessibility of Regional Financial Reports, Transparency & Accountability of Regional Financial Management*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi. pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah kota Malang dan kabupaten Malang memikul suatu tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan kepada

masyarakat kota malang dan kabupaten malang itu sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan untuk menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang bunyinya: “Untuk memenuhi asas tansparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah diprediksi akan memberikan dampak lebih baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya pemerintah kota malang dan kabupaten malang serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN (KOTA MALANG DAN KABUPATEN MALANG)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
3. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian secara empiris bahwa:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut.

#### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan dalam hal penelitian tentang laporan keuangan daerah.

#### **B. Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang Dan Kabupaten Malang  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau informasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan daerah.

2. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan Mahasiswa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sampel dalam penelitian ini menggunakan pengguna laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kabupaten Malang dan analisis menggunakan regresi linear berganda maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Variabel-variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ada banyak, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel independen; serta satu variabel dependen yaitu Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel independen yang lain agar mampu menjelaskan jumlah informasi sosial yang diungkapkan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menerapkan metode survei melalui kuesioner dengan ditambahkan teknik wawancara secara langsung, agar data dari responden akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.



2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, misalnya Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Sistem Pengendalian Intern.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Asbi 2017. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar”. *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No. 1, Oktober 2017.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diamond Jack. 2002. “Performance Budgeting–Is Accrual Accounting Required”. *IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Deponegoro.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. Buletin Teknis No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berbasis Akrual. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyana Budi. 2016. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rochman Abdul. 2010. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.

Solimi. Hehanussa J. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2015.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi keprilakuan*. Gajah Mada University Press.

